

96/00582

# SISTEM NILAI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

(Tinjauan Perspektif Filsafat Pendidikan)



Oleh:  
Sambas Prabawa

UNIVERSITAS TERBUKA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JANUARI, 1996

Mengetahui,  
Dekan FKIP-UT,

**DRS. UDIN S. WINATAPUTRA, MA**  
**NIP. 130 367 151**

Jakarta, 9 Januari 1996

Penulis,



**OPS. SAMBAS PRABAWA**  
**NIP. 131 467 662**

UNIVERSITAS TERBUKA

**KATA PENGANTAR**

Akhirnya Studi literatur ini selesaikan juga meskipun mengalami banyak hambatan dalam mencari sumber-sumber kepustakaan. Tetapi dalam penulisan ini tidak berpengaruh pada kualitas laporan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kami, lakukan penelaahan.

Penulis, pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah atas perkenan dan petunjukNya sehingga, penulis dapat melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan kewajibannya.

Selanjutnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada lembaga-lembaga kepustakaan yang memberikan berbagai informasi dalam mencari sumber penulisan. Selain itu kepada Dekan FKIP-UT yang telah menyetujui dan mengetahui dalam penyelesaian penulisan studi literatur, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelbagai pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu atas segala bantuan dan partisipasi dalam mendukung penulisan ini.

Akhirnya harapan kami tidak lain adalah semoga penulisan kepustakaan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan UT pada khususnya.

Jakarta, Januari 1996  
Penulis,

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR .....  | i       |
| DAFTAR ISI .....  | ii      |
| BAB I. PENDAHULUAN .....  | 1       |
| 1. Latar Belakang .....   | 1       |
| 2. Tujuan .....   | 2       |
| 3. Metode Penulisan .....   | 2       |
| 4. Sistematika Pembahasan .....                                   | 3       |
| BAB II. PENGERTIAN NILAI .....                                    | 3       |
| BAB III. BENTUK DAN TINGKAT-TINGKAT NILAI .....                   | 6       |
| BAB IV. NILAI-NILAI PENDIDIKAN DAN TUJUAN<br>PENDIDIKAN .....     | 9       |
| 1. Cara Penetapan Tujuan Pendidikan .....                         | 10      |
| 2. Tujuan Pendidikan .....  | 12      |
| BAB V. Norma dan Nilai-nilai di Indonesia .....                   | 14      |
| 1. Asal-usul Norma dan Nilai Bangsa<br>Indonesia .....            | 15      |
| 2. Kewajiban Sebagai Norma .....                                  | 15      |
| 3. Teori Hukum Kodrat .....                                       | 16      |
| BAB VI. ETHIKA JABATAN .....                                      | 16      |
| BAB VII. PENUTUP .....  | 20      |
| 1. Manusia .....  | 20      |
| 2. Kodrat Manusia .....   | 20      |
| 3. Pandangan terhadap Hubungan Manusia<br>dengan Masyarakat ..... | 20      |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 21      |

## SISTEM NILAI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

---

### I. PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk budaya dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup bersama dalam arti manusia hidup dalam interaksi dan interdependensi sesamanya. Manusia saling membutuhkan sesamanya baik jasmaniah (segi-segi ekonomis) maupun rokhaniah (sosial, cinta).

Dalam proses interaksi inilah diperlukan nilai-nilai, yang merupakan faktor inherent dengan antar hubungan sosial itu. Celcius menyatakan: "Ubi societas, ibi ius". "Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum". Hukum ialah norma-norma, atau nilai-nilai untuk mengatur antar hubungan sosial manusia.

Bahkan dapat kita simpulkan bahwa tiada hubungan sosial tanpa nilai-nilai (norma-norma); dan tiada nilai-nilai tanpa hubungan sosial. Dengan perkataan lain norma atau nilai adalah fungsi hubungan sosial. Artinya di dalam hubungan sosial mutlak adanya nilai-nilai.

Di dalam masyarakat, sebagai satu *Gemeinschafts* manusia hidup bersama. Manusia sebagai pribadi, dengan sifat-sifat individualitas yang unik bergaul satu sama lain. Kadang-kadang terjadi saling mengerti, saling simpati, saling menghormati dan mencintai. Tetapi adalah pula watak manusiawi adanya antipati, salah faham dan bahkan benci. Pengertian, simpati, hormat, cinta, setia atau sebaliknya antipati, salah faham, membenci, mengkhianat dan sebagainya adalah bentuk-bentuk tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan nilai-nilai yang berlaku. Setiap antar hubungan manusia selalu disertai dengan proses penilaian baik aktif (subyek yang menilai obyek), maupun pasif (subyek yang dinilai oleh subyek yang lain). Seluruh antar hubungan manusia, baik sesamanya maupun dalam lingkungan alam semesta, manusia melakukan proses penilaian, sadar ataupun tidak sadar. Realita demikian merupakan kecenderungan dan kodrat manusia.

Nilai-nilai di dalam kehidupan manusia bahkan merupakan dunia budaya manusia. Sebagai mikrosmos manusia hidup di dalam alam makrokosmos yang tiada berbeda dengan makhluk-makhluk lain, sama-sama sebagai makhluk alami. Yang mengangkat derajat martabat manusia sebagai makhluk human being adalah budi nuraninya yang sadar nilai. Sadar nilai yang bersumber pula pada "self existence", kesadaran diri terutama mengerti tujuan hidupnya atau paling tidak menyadari untuk apa manusia hidup dengan segala keterbatasan dan juga segala potensinya.

Bagaimana urgensinya nilai-nilai sosial atau norma-norma itu di dalam antar hubungan dan interaksi sosial di dalam masyarakat secara rasional dapat kita fahami. Bukankah untuk mengatur prosedur dan menetapkan siapa yang baik (sportif, juara) di dalam suatu permainan (badminton, tennis, catur, bridge dan sebagainya) di mana antaraksi itu amat terbatas, tetap perlu adanya norma berupa "*rules of games*". Mengapa di dalam antar hubungan dan interaksi sosial yang luas dan tak terbatas, tidak kita rasakan urgensi itu. Proporsi urgensi nilai sosial atau norma adalah sama urgen dalam semua antar hubungan dan interaksi itu. Hanya scope, kualitas dan wujud nilai-nilai itu yang berbeda; sedangkan esensi dan fungsinya tetap sama. Yakni sebagai kriteria, norma untuk menetapkan mana yang baik, benar, salah buruk dan sebagainya.

Pendidikan dalam hubungannya dengan nilai-nilai tidak saja supaya anak mengerti, memahami, sadar nilai-nilai sosial. Melainkan lebih-lebih supaya mereka melaksanakan secara loyal, demi ketertiban sosial, dan demi kesejahteraan batin (tiadanya konflik, rasa berdosa) di dalam jiwa mereka.

## **2. Tujuan**

Tujuan penulisan ini adalah mengkaji konsep nilai dalam kehidupan manusia.

## **3. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan studi pustaka ini didasarkan pada bahan-bahan yang dikumpulkan melalui literatur-

literatur dan metode deskriptif, analisis yang dipakai bersifat kualitatif.

#### 4. Sistematika Pembahasan

Pokok bahasan yang akan dikemukakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Pengertian nilai
- b. Bentuk dan tingkat-tingkat nilai
- c. Nilai-nilai pendidikan dan tujuan pendidikan
- d. Norma dan Nilai-nilai di Indonesia
- e. Etika jabatan

## II. PENGERTIAN NILAI

Segala sesuatu yang ada dalam semesta, langsung atau tak langsung, disadari ataupun tidak disadari manusia, mengandung nilai-nilai tertentu. Matahari dan bintang-bintang, panas dan air, udara dan cahaya, tumbuh-tumbuhan dan hewan semua mempunyai nilai bagi kehidupan manusia. Demikian pula yang abstrak seperti cinta sesama, kejujuran, kebajikan, pengabdian, keadilan dan sebagainya adalah perwujudan nilai-nilai di dalam dunia budaya manusia.

Secara umum, scope pengertian nilai adalah tak terbatas. Segala sesuatu dalam alam raya adalah bernilai. Nilai adalah seluas potensi kesadaran manusia. Variasi kesadaran manusia sesuai dengan individualitas dan keunikan kepribadiannya. Ada manusia yang memuja materi, karena baginya hidup ini ditentukan oleh materi. Ada manusia yang memuja keindahan, karena di dalamnya manusia menikmati kebahagiaan, ada pula manusia yang mengembara dalam kosmos, menjelajahi angkasa untuk mencari nilai hidupnya. Banyak manusia yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan, ada yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Semuanya adalah perwujudan kesadaran nilai dalam masing-masing pribadi.

Nilai-nilai sedemikian universal dan tak terbatas. Tetapi ada pula orang yang membatasi nilai-nilai dalam arti tertentu, yakni sebagai norma tertentu. Seperti dinyatakan Celcius: Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Hukum dalam hal ini

dimaksudkan sebagai nilai-nilai, norma, pengatur ketertiban kehidupan sosial. Nilai hukum ialah dalam potensinya untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban hidup bersama. Dengan demikian dapat ditafsirkan hukum merupakan nilai instrumental, nilai yang mendatangkan nilai yang lain, yakni ketertiban sosial.

Bermacam-macam interpretasi manusia sepanjang sejarah tentang nilai-nilai. Multi interpretasi inilah yang melahirkan berbeda-beda cara manusia hidup. Manusia menganut berbagai-bagai nilai-nilai, mulai nilai agama sampai kehidupan non-agama, kehidupan tanpa nilai, faham nihilisme, anarchisme, atheisme.

*Apakah sesungguhnya nilai itu ?*

Perkembangan penyelidikan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai terutama amat pesat dalam dua abad terakhir ini. **Karl Marx** misalnya khusus menyelidiki nilai-nilai ekonomi (*theory of surplus values*) dan bagaimana hidup manusia ditentukan oleh nilai tersebut. Nilai ekonomi, nilai materi dianggap sebagai satu-satunya nilai yang menentukan hidup manusia. Pandangan ini, kemudian yang dikenal sebagai faham Komunisme, Materialisme.

Tetapi kesimpulan kaum Materialisme ini tidak representatif, jauh daripada valid.

Menurut **Brubacher**, pengertian value itu adalah tak terbatas, sangat erat dengan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks. Ia melukiskan sebagai berikut:

*"A moments's reflection will reveal that this infinitive means both to value and to evaluate. The same difference appears in to price and to appraise, to esteem and to estimate."* (5:101).  
Pikiran seperti akan mengerti bahwa pengertian yang tak terbatas daripada nilai meliputi kedua istilah nilai dan penilaian. Perbedaan yang sama akan nampak pula dalam istilah atau pengertian harga dan penghargaan, antara kata esteem dan estimate. (menghormati dan memperkirakan).

Untuk menjawab apakah nilai itu **Encyclopedi Britannica** menulis tentang nilai sebagai berikut:

*Value "exist" in the sense that they are operative and effective in and on human minds and in human action, and find embodiment in the objective institutions of society. They are*



"real" in the sense that they are valid, that is they claim to be true ideals as opposed to false ideals or fictions.

Nilai itu sungguh-sungguh ada dalam arti bahwa ia praktis dan efektif di dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga secara obyektif di dalam masyarakat. Nilai-nilai itu sungguh-sungguh satu realita dalam arti ia valid sebagai suatu cita-cita yang benar yang berlawanan dengan cita-cita yang palsu atau bersifat khayali.

Sepanjang sejarah peradaban manusia masalah nilai tetap merupakan problem, walaupun selama itu pula manusia tetap tak dapat mengingkari efektivitas nilai-nilai di dalam kehidupannya.

Kaum penganut **Sophisme** dengan tokohnya **Protagoras** (481-411 SM) berpendapat bahwa kebenaran dan nilai bersifat relatif, tergantung pada waktu, tempat dan manusia. Protagoras menyatakan; "*Man is the measure of all things*".

**Perry, Ralph Barton** menyatakan bahwa "*value as any object of any interest*".

Interest yang dimaksud Perry ialah *individual's interest*, minat individu, jadi amat bersifat subyektif.

**John Dewey** (1859 - 1952) berpendapat bahwa "*value is any object of social interest*". Brubacher menjelaskan makna "interest" sebagai "*to be between*" (antara). Karena itu dalam hubungan atau antar hubungan antara subyek dengan sesuatu. Misalnya antara anak-anak - kurikulum, antara pribadi - sesuatu yang diinginkan, dan sebagainya. Dan sesungguhnya manusia dalam antar hubungan dan interaksi di dalam kehidupannya selalu mengalami proses "*interest*" demikian. Dalam makna inilah pula nilai dapat menjadi motivasi tindakan manusia, lebih-lebih di dalam proses pendidikan. Karena yang bernilai ialah yang menarik hati, keinginan subyek; dan keinginan ini mendorong untuk dicapai demi kepuasan, baik lahiriah maupun rokhaniah atau kedua-duanya.

Kedua tokoh di atas meng-approach persoalan nilai ini melalui tingkah laku yang dapat diobservasi dan dialami di dalam lingkungan hidup manusia dalam antar hubungan dan interaksi dengan lingkungan. Bagi **Dewey dan Perry** teori nilai adalah suatu teori nilai adalah suatu teori dan usaha ilmiah yang terbuka untuk diobservasi dan verifikasi.

Pengikut-pengikut **Hegel (Hegelian)** menganggap nilai sebagai berikut: *"The core principle of coherence in their philosophy was intrinsically a universal value principle. Value for them permeated the universe"*.

*"Prinsip utama dalam filsafat mereka ialah pandangannya tentang prinsip nilai universal. Bagi mereka nilai itu meliputi alam semesta, bersifat universal"*.

Menurut pandangan Idealisme, Hegelian ini, nilai ialah suatu yang bersifat normatif dan obyektif, berlaku umum. Bahkan nilai itu menjadi idealisme, cita-cita tiap pribadi yang mengerti dan menyadarinya. Sebaliknya nilai itu menjadi norma, ukuran untuk suatu tindakan seseorang apakah itu baik, buruk dan sebagainya.

Hegelian berpikir, bahwa semesta yang tertib sebagai perwujudan hukum alam yang universal, dan kekal itu terjadi di dalam alam raya dan melibatkan semua isinya. Manusia sebagai bagian alam universal itu plus rasio dan idealisme wajar sekali meningkatkan tertib alami itu menjadi tertib rasional, tertib manusiawi dan tertib sosial. Nilai-nilai itu bersifat obyektif, dan keinginan manusia secara individual.

Nilai bukan semata-mata untuk memenuhi dorongan intelek dan keinginan manusia. Nilai justru berfungsi untuk membimbing dan membina manusia supaya menjadi lebih luhur, lebih matang sesuai dengan martabat human-dignity. Dan human-dignity ini ialah tujuan itu sendiri, tujuan dan cita manusia.

Konsep demikian sejalan juga dengan pokok ajaran **Kant** yang menyatakan bahwa: *"..... value more objectively. To them values are intrinsic; they derived from their designer or maker rather than from their user"*.

*"..... nilai-nilai itu bersifat lebih obyektif. Bagi mereka nilai-nilai itu bersifat intrinsik; nilai-nilai itu berasal dari Maha Pencipta dan bukan dari manusia"*.

### III. BENTUK DAN TINGKAT-TINGKAT NILAI

Menurut uraian ringkas dalam bagian muka bab ini, maka nilai itu merupakan segala sesuatu dalam hubungannya dengan

subyek, manusia. *"Things are valueable as they are personally felt to be valueable"*. *"Sesuatu dianggap bernilai jika pribadi itu merasa bahwa sesuatu itu bernilai."*

Pendapat kedua menyatakan bahwa nilai-nilai itu bersifat obyektif, dan bersifat intrinsik yang telah diciptakan oleh Maha Pencipta: bukan ditentukan oleh manusia. Bahkan manusia sebagai subyek itulah sebagai tujuan. *"..... the Kantian imperative to treat the individual always as an end"*.

"Pengikut Kant memandang bahwa manusia sebagai pribadi itu sebagai tujuan". "Manusia secara instrinsik ialah nilai itu esendiri dan merupakan tujuan itu sendiri." "Nilai-nilai" yang lain selain manusia, bernilai untuk mencapai tujuan manusia, yaitu pribadi ideal. Tujuan manusia ialah kebaikan dan keluhuran manusia sendiri, tidak mengejar sesuatu yang diluar manusia. Pokok pikiran yang kedua ini tercermin dengan kata-kata:

*"Central in their hierarchy is the intrinsic nature of man. Hence the ultimate aim of education is self - realization, the fulfilment of man's intrinsic potentialities for many, in addition, the realization of eternal life"*.

"Pusat dalam hierarkhi nilai ialah nilai intrinsik yang terkandung di dalam kodrat manusia. Karena itu tujuan akhir pendidikan ialah self realisasi, untuk merealisasikan potensi-potensi manusia dan sebagai tambahan, bagi banyak orang self-realisasi itu dimaksudkan untuk kehidupan yang kekal".

Seluruh proses pendidikan, khususnya tujuan pendidikan tidak saja berhubungan dengan nilai, bahkan merupakan proses pembinaan nilai di dalam kepribadian manusia. Karena itu pendidikan dan nilai adalah tak dapat dipisahkan.

Ada pula para ahli yang membedakan bentuk nilai-nilai berdasarkan untuk bidang apa nilai itu efektif berfungsi. Misalnya ada nilai hukum, nilai moral, nilai ekonomi, nilai estika, dan sebagainya.

**Edward Spranger** membedakan nilai berdasarkan interest pribadi manusia. Ada enam tipe manusia karena kepribadian orang itu menganggap salah satu nilai tersebut paling utama (dominan) bagi hidupnya. Nilai-nilai tersebut ialah: nilai religi, nilai

ilmiah, nilai ekonomi, nilai politik (kekuasaan, negara) nilai estetika dan nilai sosial (nilai kemanusiaan).

Pembagian tingkat perkembangan kebudayaan manusia menurut Auguste Comte atas (1) tingkat *theologis*, (2) tingkat *metafisis*, dan (3) tingkat *positif*, mengandung pula pengertian tentang tingkat nilai di dalam kebudayaan manusia. Bagi **Comte** ketiga tingkatan perkembangan itu merupakan pula hierarkhi nilai dalam kehidupan manusia, Tegasnya, nilai yang paling sederhana, rendah tarafnya ialah nilai *theologis*. Kemudian meningkat kepada nilai filsafat; dan terakhir manusia tiba pada nilai tertinggi yang positif, yakni nilai pengetahuan eksakta. Yakni nilai-nilai yang dianut kaum *rasionalis* dan *secularis* sebagai nilai yang tertinggi di dalam kehidupannya.

Brubacher menulis antara lain tentang ini: "*If the secularist has any religion at all, it is likely that scientific doctrines the presup-positions of that religion and that scientists are its high priests*".

Pada umumnya masyarakat menganut pendapat bahwa hierarkhi nilai di dalam kehidupan manusia ialah identik dengan hierarkhi tingkat-tingkat kebenaran. Sebab, kebenaran ialah nilai itu sendiri. Apa yang benar itu selalu mengandung kebaikan, dan sebaliknya kebaikan itu selalu benar. Tingkat-tingkat kebenaran seperti tingkat indera, tingkat ilmiah, tingkat filosofis dan tingkat religious adalah paling wajar di dalam kehidupan manusia. Kewajaran itu bersumber pada proses pertumbuhan kesadaran pribadi sendiri: yakni mula-mula manusia pada awal perkembangannya hanya menyadari segala sesuatu melalui inderanya. Kemudian baru meningkat kepada kesadaran yang lebih rasional, yakni tingkat kesadaran atas nilai-nilai ilmiah.

Demikian seterusnya ke tingkat filosofis dan religious.

Sedangkan tingkat religious, di samping merupakan tingkat integritas kepribadian yang mencapai tingkat budhi (*consciencia, insan kamil*), juga materi kebenaran dan kebaikan religious itu bersifat mutlak, universal, dan suci. Kebenaran dan kebaikan religious mengatasi rasio, perasaan, keinginan, nafsu-nafsu manusiawi. Kebaikan yang bersumber dari religi bersifat

universal, melampaui subyektivitas golongan, ras, bangsa, tingkat/kelas sosial, apalagi lebih-lebih subyektivitas pribadi.

Ada pun nilai-nilai yang berwujud patriotisme, heroisme, altruisme, kesadaran tanggung jawab, cinta sesama, demokrasi dan sebagainya adalah produk daripada kesadaran nilai yang fundamental yang bersumber pada keempat nilai dalam hierarkhi tersebut. Artinya, baik sebagai produk daripada salah satu, sebagian atau semuanya (keempat-empat nilai tersebut).

Implikasi keempat nilai dalam hierarkhi tersebut amat praktis di dalam pendidikan dalam rangka membina kepribadian ideal.

#### IV. NILAI-NILAI PENDIDIKAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pendidikan secara praktis tak terpisahkan dengan nilai-nilai terutama yang meliputi: kualitas kecerdasan, kerajinan, ketekunan, bahkan nilai yang dijabarkan dalam wujud kelas (tingkat, grade), nilai berupa rank, score, marks.

Lebih-lebih lagi pendidikan terutama masalah proses pembinaan nilai-nilai yang bersifat fundamental seperti: nilai-nilai sosial, nilai ilmiah, nilai moral, nilai agama. Atau tersimpul di dalam tujuan pendidikan yakni membina kepribadian ideal.

Proses dan pelaksanaan pendidikan tak mungkin berjalan tanpa arah yang hendak dicapai sebagai garis kebijaksanaan, sebagai program, dan sebagai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan baik isinya maupun rumusnya tak mungkin ditetapkan tanpa pengertian dan pengetahuan yang tepat tentang nilai-nilai. Bahkan seharusnya kita telah memegang satu keyakinan tentang nilai-nilai yang kita anggap sebagai kebenaran.

Membahas nilai-nilai pendidikan, akan jelas melalui rumusan dan uraian tentang tujuan pendidikan. Sebab di dalam rumusan tujuan pendidikan itu tersimpul semua nilai pendidikan yang hendak diwujudkan di dalam pribadi anak didik.

Pendidikan sebagai ilmu praktis yang normatif berarti menetapkan asas norma yang hendak dilaksanakan oleh proses

pendidikan. Ilmu pendidikan menjadi pembimbing praktis pelaksanaan membina kepribadian manusia. Dan asas-asas normatif yang berlaku di dalam masyarakat dan negara menjadi nilai-nilai ideal yang menjadi pendorong, motivasi bagi anak didik dalam cita-cita hidupnya, self-realization. Bahkan nilai-nilai itu pula yang menjadi isi pokok (*core-curriculum*) pendidikan. Nilai-nilai ini pula yang akan menentukan metode pengajaran, sistem dan organisasi kurikulum.

Nilai-nilai di dalam masyarakat amat luas scope dan variasinya, nilai-nilai itu heterogin, pluralistis. Sebab masyarakat terbentuk atas banyak warga masyarakat, golongan dan tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan. Malahan masyarakat demokratis modern cenderung untuk pluralistis. Misalnya ada yang menganut agama Katholik, Protestan, Islam, Hindu: bahkan ada pula yang non-agama, masih memilih agama. Demikian pula pandangan sosial politik warganegara berbeda-beda sebagai konsekuensi asas dan nilai-nilai demokrasi.

Pendidikan yang diselenggarakan negara, *public-education*, adalah untuk kepentingan rakyat keseluruhan, tanpa merugikan atau menguntungkan salah satu golongan di dalam masyarakat. Oleh karena itu tujuan pendidikan hendaknya representatif bagi nilai-nilai yang dianut pribadi. Negara dan lembaga-lembaga pendidikan umum hendaknya selalu mempertimbangkan realita bahwa manusia itu menduduki status rangkap: (1) manusia sebagai pribadi dengan nilai-nilai yang amat bersifat pribadi pula, (2) manusia sebagai warga masyarakat, warga negara, manusia sebagai makhluk sosial.

Walaupun integritas manusia menyebabkan tidak adanya pemisahan kedua status tersebut, namun sebagai konsekuensi nilai-nilai demokrasi (kemerdekaan, hak asasi, self-repect) pribadi sendiri akan menyadari perbedaan tersebut. Sedangkan pelaksanaannya akan tercermin di dalam kesadaran pribadi tentang hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab di dalam hidupnya.

### **1. Cara penetapan tujuan pendidikan**

Untuk menetapkan tujuan pendidikan, para pendidik mengapproach masalah itu meliputi:

- (a). **Approach melalui analisa historis lembaga-lembaga sosial** (*a historical analysis of social institutions approach*).

Orang berorientasi kepada realita yang sudah ada, yang telah tumbuh sepanjang sejarah bangsa itu. Kenyataan hidup, *way of life*, *Weltanschauunh*, tata sosial, kebudayaan yang diwarisi menjadi di pusat orientasi.

Sesungguhnya approach ini akan menghasilkan suatu status quo. Analisa sejarah dapat menetapkan kenyataan yang terjadi, apa yang telah diinginkan masyarakat. Tetapi analisa itu tak mungkin menetapkan apa yang diinginkan masyarakat yang akan datang. *Approach historis* dianggap tak mampu melakukan prediksi dan perencanaan tentang bagaimana bentuk dan nilai-nilai sosial yang dikehendaki oleh hari depan, generasi mendatang.

Lembaga-lembaga sosial yang ada, adalah perwujudan dan warisan masa silam. Bagaimana efektivitas lembaga-lembaga ini berfungsi untuk hari depan dengan segala perkembangan ilmu dan sosial yang tak terduga, sukar untuk dijangkau.

- (b). **Approach scientific analysis of current life**, pendekatan berdasarkan analisa ilmiah tentang realita kehidupan sekarang yang aktual.

Berdasarkan analisa atas realita aktual secara ilmiah maka dapat dilukiskan kenyataan itu melalui analisa diskriptif tentang keseluruhan hidup masyarakat di satu pihak. Dan aktivitas anak-anak, aktivitas orang dewasa, motif dan latar belakang kegiatan tersebut, bahkan juga minat dan tujuan aktivitas itu.

Dengan semua itu dapat dijabarkan perwujudan pendidikan seperti kurikulum, aktivitas yang menunjangnya, analisa proses belajar mengajar, studi psikologis dengan bersumber pada kodrat perkembangan anak; individu dan kelompok. Ini juga meliputi analisa kebutuhan sosial, analisa jabatan, untuk mana pendidikan aktif mempersiapkan.

Kedua pendekatan menurut **Brubacher** itu dilaksanakan secara terpisah. Karena itu pendekatan itu kurang realistis. Adalah bijaksana jika kedua pendekatan tersebut disintesakan demi

Weltanschauung bangsa itu. Eksistensi bangsa dengan kebudayaannya banyak ditentukan oleh proses pewarisan ini. Hal ini tercermin di dalam core-curriculum yang menjamin identitas nasional, proses regenerasi di dalam bangsa itu.

Proses pendidikan juga meliputi pembinaan kemampuan-kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial untuk berperanan secara kreatif.

Bukan saja menciptakan dan mengembangkan ilmu-ilmu baru, lapangan-lapangan kerja baru, tetapi juga membina sikap hidup kritis terhadap nilai-nilai yang ada dan yang baru ada, bahkan membina pola-pola tingkah laku baru yang sesuai dengan asas-asas norma yang berlaku tetapi dengan pemahaman berpikir yang baru, lebih mendalam.

Oleh sebab itu penetapan tujuan pendidikan harus dilatar belakangi kedua approach tersebut itu. Malahan sesungguhnya akan lengkap bila disamping kedua approach itu, dilengkapi dengan approach ketiga yakni dengan *normative-philosophy approach*.

## 2. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan biasanya dirumuskan dalam bentuk tujuan akhir (*ultimate aims of education*), sebab tujuan akhir ini meliputi semua tujuan pendidikan.

Secara umum tujuan pendidikan ialah kematangan dan integritas pribadi. Ada pula yang menrumuskan dengan kata-kata kesempurnaan (*perfection*).

Namun rumusan padat di atas tidak melukiskan suatu gambaran makna yang jelas, sehingga rumusan tersebut tidak operatif. Mengapa demikian? Sebab, bagi seorang Pragmatis, integritas itu tak pernah final (berakhir). Integritas dapat saja diartikan sebagai pertumbuhan (*growth*) yang terus menerus, dinamis progresif, selalu mampu adaptasi dan re-adaptasi terhadap segala perubahan-perubahan kondisi lingkungan hidupnya.

Bagi seorang religius, *perfection*, kesempurnaan ialah kebajikan kepada Tuhan dan sesama manusia demi hidup kekal. Kesempurnaan kaum religius ini malahan melampaui makna



kesempurnaan dunia, seperti ajaran yang disadarkan Jesus: "Jadilah manusia sempurna sesempurna Bapak yang di syorga". Bagi kaum religous tak ada makna kesempurnaan ialah proses evolusi yang sempurna baik phisik maupun psikis. Secara praktis dalam faham materialisme yang Komunistis, kesempurnaan ialah monoloyalitas kepada doktrin dan idelogi Komunis tanpa reserve.

Bagi kaum Naturalis, seperti dianjurkan oleh J.J. Rousseau tujuan akhir pendidikan ialah self-realisasi potensi-potensi manusia menjadi kenyataan di dalam tindakan yang nyata. Atau seperti dikatakan **Rousseau:**

powers .....

the education is not to make a soldier, magistrate, or priest, but to make a man.

*individu ....*

pendidikan bukanlah berfungsi untuk membina manusia menjadi prajurit, pembesar atau hakim, atau pun pendeta, melainkan untuk membina seseorang menjadi manusia.

Tetapi *self-realisasi* itu pun ada beberapa tafsiran pula. Apakah realisasi potensi pribadi itu membuat orang menjadi pujangga, sarjana filosof, dan sebagainya ? Apakah realisasi potensi itu meliputi jasmani dan rokhani. Ataukah potensi rokhani saja yang direalisasi semaksimal mungkin. Sehingga seseorang cenderung menjadi ahli pengetahuan, intelektual, karena ketinggian tingkat intelegensi ini dapat mengerti Tuhan, dan selanjutnya menjadi dasar kebajikan - seperti ajaran Aristoteles yang disetujui oleh **Thomas Aquinas**.

Ataukah benar mereka yang menafsirkan bahwa self-realization sebagai manusia yang mampu menunaikan fungsi sosial. Sebab manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup di dalam satu struktur sosial dengan segala aspek kehidupan yang menuntut kemampuan serbaguna, Brubacher melukiskan kedudukan manusia dalam struktur sosial dalam hubungan dengan self-realisasi antara lain sebagai berikut:

"Karena itu self-realisasi adalah masalah partisipasi yang seimbang di dalam lembaga-lembaga masyarakat. Ia adalah partisipasi dalam arti bukan hanya terhadap lembaga-lembaga sosial yang ada, melainkan terhadap segala perubahan yang terjadi

di dalam lembaga dan masyarakat itu, juga terhadap cita perubahan yang ideal. Sebab itu tujuan akhir pendidikan akan berbeda-beda yang bersumber dari bentuk asal masyarakat, baik yang berasaskan demokrasi, fasisme maupun komunisme".

Sedangkan tujuan pendidikan bangsa Indonesia yang berfilsafat negara Pancasila, seperti termaktub dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 jo. Tap MPR No.IV/MPR/1978 jo. Tap MPR No.II/MPR/1983 tentang GBHN sebagai berikut:

*"Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa".*

Rumusan tujuan akhir pendidikan harus dijabarkan dalam bentuk taksonomi, yang terutama meliputi:

- a. Pembinaan kepribadian (nilai formal)
  - sikap (attitude)
  - daya pikir kritis rasional
  - objectivitas
  - loyalitas kepada bangsa dan ideologi
  - sadar nilai-nilai moral dan agama.
- b. Pembinaan aspek pengetahuan praktis
- c. pembinaan potensi jasmani yang sehat dan kuat

#### **V. NORMA DAN NILAI-NILAI DI INDONESIA**

Etika filosofis di dunia timur tidak dapat terlepas dari ikatan agama, bahkan selalu berakar pada salah satu agama dan menjadi bagian dari keagamaan. Maka sesuai dengan salah satu sumber etika yang ada di Indonesia, yaitu agama; ternyata etik filosofis tersebut dapat diterima sejauh mana mempunyai kaitan dengan norma-norma etik lainnya.

Adanya kecenderungan persamaan antara nilai etik tertentu dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia, khususnya etik yang akan di bahas di bawah ini yaitu kewajiban sebagai norma

(*formalisme Immanuel Kant*) dan teori hukum kodrat (*Thomas Aquinas*).

### 1. Asal-usul norma dan nilai bangsa Indonesia

Pengetahuan kita tentang nilai-nilai dan norma-norma dari etik bangsa Indonesia yang mula-mula hanya merupakan hasil rekonstruksi dari cara-cara hidup mereka sebelum muncul pengaruh budaya Hindu, Islam, dan Barat. Yang mempunyai arti adalah bagian terakhir dari masa Neolitik dan jaman Megalitik, karena dalam masa inilah munculnya kebudayaan yang tertentu tingkatnya. Mereka bukan lagi bangsa yang masih berpindah-pindah, cara kehidupan telah menunjukkan adanya organisasi masyarakat yang teratur. Gotong royong menjadi dasar hidupnya, sampai sekarang pun suatu pekerjaan besar di desa dilakukan secara gotong royong. Kepercayaan animisme dan dinamisme pada hakekatnya ialah untuk menjaga agar jiwa, semangat itu selalu merasa senang kepada orang yang menyediakan "sesuatu" (misalnya sesajian) dan untuk tidak menjadikannya marah.

Sisa-sisa etik bangsa Indonesia yang mula-mula itu masih kita lihat sekarang pada berbagai upacara di dalam berbagai peristiwa hidup yang penting-penting, selamat, penghormatan pada roh nenek moyang, dan sebagainya.

### 2. Kewajiban sebagai norma

**Immanuel Kant** melihat kewajiban sebagai norma perbuatan yang baik. Dengan mengambil perangsang-perangsang yang datang dari dunia luar masuk ke dalam tubuh manusia sebagai titik tolaknya, Kant mendasarkan hasil pengolahan jiwa yang pada akhirnya menghasilkan konsep-konsep pengalaman dan berbentuk empiris.

Disamping itu ia mengambil bentuk-bentuk pengamalan dan bentuk-bentuk berpikir sebagai sesuatu yang telah dipunyai oleh manusia sejak sebelum ia berpengalaman, yang disebut apriori. Yang dapat dijangkau oleh akal budi hanya sesuatu yang telah diterimanya melalui pancainderanya. Ini disebut fenomena. Sedangkan hakekat sesuatu yang disebut noumena tidak dapat dijangkau oleh akal budi yang murni.

Bagi **Kant**, hukum alam atau rasa kewajibanlah yang merupakan peraturan tertinggi yang berlaku untuk semua orang. Peraturan itu sendiri memang baik, tetapi lebih penting manusia. Di sisni mulai timbul perhatian pada akibat satu perbuatan. Kalau tidak peraturan-peraturan kita hanya akan memperhatikan akibat-akibat dari perbuatan itu saja. Misalnya kalau kita hendak berteman, perbuatan kita hendaknya menyenangkan hati orang lain. Kalau ada orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain, itu mungkin saja; tetapi ia pun haruslah melakukan kewajiban-kewajiban, yang tidak tergantung pada selera seseorang. Karena itu kewajiban-kewajiban hakekatnya sama bagi setiap orang, juga harus ada peraturan universal sehingga akan dapat dipatuhi oleh semua orang.

### 3. Teori Hukum Kodrat

Menurut **Thomas Aquinas** sesuatu hal yang baik itu adalah yang sesuai dengan tujuan manusia, atau menurut istilahnya yang sesuai dengan hukum kodrat (manusia). Secara singkat etika ini dapat dirumuskan dalam kaidah sebagai berikut: "Bertunduklah sesuai dengan kodratmu sebagai manusia, yaitu sempurnakanlah kemampuan dan dengan ini engkau sekaligus akan mencapai kebahagiaan yang sebenarnya, serta memenuhi kehendak Allah yang nampak dalam kodrat/kemanusiawianmu".

Etika ini menjelaskan bahwa nilai moral tindakan manusia ditentukan oleh akibatnya, yaitu apakah manusia disempurnakan olehnya, maka termasuk teori teleologis. Dan sekaligus bersifat "eudemonis" karena bertindak dengan betul itu berdasarkan pertimbangan bahwa hanya dengan demikian kebahagiaan yang sebenarnya dapat tercapai.

## VI. ETHIKA JABATAN

Fungsi dan tanggung jawab mendidik di dalam masyarakat hampir merupakan kewajiban setiap warga masyarakat. Setiap warga masyarakat yang sadar akan nilai dan peranan pendidikan bagi generasi muda, khususnya anak-anak di dalam dilingkungan keluarga sendiri, akan rela mengemban tugas mendidik itu. Secara kodrati, atau secara naluri, atau apapun namanya, tiap orang tua merasa

berkepentingan dan berharap supaya anak-anaknya menjadi manusia atau orang yang mampu berdiri sendiri. Semua orang tua mencita-citakan dan berusaha sambil mendoakan supaya harapan demikian itu menjadi kenyataan. Karena itu kewajiban mendidik dalam arti informal ini merupakan panggilan, sebagai kewajiban moral tiap manusia, sebagai homo educandum.

Pengertian masyarakat tentang kewajiban mendidik itu terutama dibebankan kepada ibu rumah tangga, sebab suami (bapak) dianggap sibuk mencari nafkah. Konsepsi demikian dianggap kurang tepat, sebab dalam zaman modern ini banyak pula wanita yang turut berperanan di dalam masyarakat (*kegiatan sosial*) bahkan banyak juga yang mencari nafkah.

Bahwa ibu dalam mendidik anak lebih langsung, lebih mesra, lebih alamiah dan yang pertama - sejak dalam rahim - memang ada benarnya. Tetapi bahwa ayah dengan demikian menjadi sekunder, adalah konsepsi yang keliru. Kedua orang tua tetap mengemban tugas mendidik yang sama menurut waktu dan kemampuan yang ada padanya. Cinta dan kewibawaan mendidik seperti di atas adalah kewajiban moral, tanggung jawab moral tiap manusia. Ini adalah kewajiban dan tanggung jawab etis.

Di dalam masyarakat yang relatif moder, lembaga-lembaga pendidikan formal untuk mendidik anak-anak didirikan menurut urgensi kemajuan. Tanpa mengurangi kewajiban dan tanggung jawab moral orang tua, sebenarnya para pendidik, guru (*professional*) juga mengemban tugas dan tanggung jawab moral dan formal dalam pendidikan.

*Apakah etika jabatan (professional ethics) ?*

Pendidik atau guru dalam melaksanakan tugas pendidikan melakukan antar hubungan sosial dengan semua mereka yang terlibat dalam proses pendidikan itu. Mereka melakukan hubungan langsung dengan murid-murid, kolega, dengan masyarakat khususnya orang tua murid, dengan pengurus-pengurus yayasan sekolah dan lain-lain. Dalam antar hubungan ini perbedaan-perbedaan pendapat, konsepsi tertentu, pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya mudah sekali terjadi, lebih-lebih di dalam masyarakat demokratis yang rakyatnya makin kritis.

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (*ultimate and proximate aims of education*), karena luasnya pengertian yang terkandung di dalamnya dan luas pula interpretasinya, mudah terjadi perbedaan antara guru dan murid. Apakah guru melaksanakan tugas untuk ini didorong oleh motivasi dan minatnya ataukah benar-benar demi motivasi dan minat murid-muridnya? Yang jelas kedua pihak berkepentingan, sedangkan motivasi dan minat mereka bersifat overlap. Bagaimana men-clear-kan persoalan ini secara adil dan fair adalah persoalan "*ethika jabatan*".

Bagaimanakah realita hubungan guru dengan murid-muridnya, dengan koleganya? Samakah hubungan itu dengan antar hubungan manusia pada umumnya? Dan samakah juga hubungan guru dan murid itu dengan hubungan antara dokter dengan pasien, seorang pengacara dengan kliennya, antara seorang perdesa dengan anggota jamaahnya? Dan bagaimanakah seharusnya (asas normatif) antar hubungan itu?

Perluakah satu kode *ethik jabatan* ini secara tersendiri, ataukah termasuk *ethik* dalam arti umum saja. Sebab pada dasarnya tindakan moral, kebajikan atau kejahatan, tetap akan bernilai baik atau buruk siapa pun pelakunya. Karena itu *ethika* untuk kaum profesional, pejabat tidak perlu bersifat khusus, ataukah justru lebih-lebih diperlukan.

Yang jelas kaum profesional adalah mereka yang telah menempuh pendidikan relatif cukup lama, mengalami latihan-latihan khusus. Seorang guru, apalagi dengan kualifikasi dan gelar kehormatan tertentu. Mereka kaum terpelajar, kaum intelek yang disamping secara pribadi telah mendapat kehormatan karena jabatan tertentu itu, sekaligus lebih-lebih mempunyai kedudukan karena pengangkatan resmi oleh negara. Kedudukan dengan segala kehormatan dan wewenang ini pastilah memberi sipil efek, efek sosial yang luas baik langsung maupun tidak langsung. Setiap sikap dan tindakan mereka akan cukup berpengaruh dan punya efek sugestif.

Demikian pula sebaliknya, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kehormatan korps mereka akan terganggu, tercemar. Itulah sebabnya kehormatan mereka mempunyai konsekuensi dan

kewajiban yang besar dalam arti mereka punya kewajiban-kewajiban moral yang lebih daripada orang kebanyakan umumnya.

Sudah tentu untuk menetapkan suatu kode ethika jabatan melalui filsafat pendidikan bukan maksud uraian ini, karena kode ethika tersebut amat ditentukan oleh norma-norma yang berlaku bagi masyarakat itu. Namun asas-asas umum yang universal yang dapat dipandang sebagai prinsip umum dapat dikemukakan.

**Asas-asas dimaksud misalnya:**

1. Melaksanakan kewajiban dengan dasar good will atau i'tikad baik, dengan kesadaran pengabdian.
2. Memperlakukan siapa pun, anak didik atau pun kolega sebagai satu pribadi yang sama dengan pribadi dirinya sendiri. Manusia pada umumnya harus dianggap sebagai tujuan, dan bukan sebagai alat untuk kepentingan siapa pun. Setiap kita wajib menghormati martabat kemanusiaannya dan martabat pribadinya.
3. Menghormati prestige, perasaan setiap orang.  
Terutama menyimpan rahasia yang berhubungan dengan kasus-kasus pribadi, hal pribadi seseorang, seperti halnya juga loyal dalam menyimpan rahasia negara. Sebaliknya menghormati prestasi seseorang tanpa menyembunyikan rasa hormat, penghargaan yang sewajarnya kepada mereka yang berhak.
4. Selalu berusaha menyumbang ide-ide, konsepsi-konsepsi dan karya-karya (ilmiah) demi kemajuan bidang kewajibannya (misalnya mendidik). Adalah tidak susila menyembunyikan suatu penemuan ilmiah apa pun, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat apa pun dari pemikirannya. Seorang profesional, sarjana wajib mempublikasikan karya-karyanya demi generasi muda dan demi masyarakat, kemanusiaan umumnya. Menjunjung tinggi kebebasan ilmiah (*academic freedom*) dengan kesadaran tanggung jawab dan pengabdian yang dilandasi oleh kewajiban-kewajiban moral.
5. Akan menerima haknya semata-mata sebagai satu kehormatan, dan bukan karena *vested-interest*. Sebaliknya dengan dalil apa pun tiada akan menerima apa pun (suapan, "uang tambahan") yang secara wajar dapat difahaminya sebagai sesuatu yang di luar kewajaran yang biasa berlaku

Kelima prinsip kode etika jabatan ini mungkin dengan modifikasi tertentu mengalami interpretasi dan re-interpretasi menurut tempat, dan zaman. Hal demikian di luar wewenang filsafat pendidikan untuk menetapkan secara definitif batas-batas modifikasi itu. Tetapi essensia yang terkandung di dalam amanat ke lima prinsip itu selalu akan menggugah hati nurani mereka yang sadar untuk menjunjung pesan itu sebagai satu kewajiban moral, sebagai satu dasar etika jabatan.

## VII. PENUTUP

### 1. Manusiawi

Naluri yang terkuat dalam diri manusia adalah keinginan untuk mempertahankan hidup dan mengejar kehidupan yang lebih baik untuk mencapainya, harus ada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dengan alam, dengan bangsa, dengan Tuhannya.

Tetapi bukanlah merupakan manusia yang ditempatkan di luar batas kemampuan dan kelayakan manusiawi, dalam arti di luar kemampuan dan kelayakan manusiawi, dalam arti di luar kemampuan yang dapat dicapainya. Walau bagaimana juga manusia mempunyai keterbatasan-keterbatasan.

### 2. Kodrat Manusia

Untuk dapat diamalkan secara manusiawi, maka nilai-nilai tersebut harus berpangkal pada kodrat manusiawi, khususnya dari arti dan kedudukan manusia dengan manusia lainnya. Sebab manusia dapat hidup dengan baik dan akan mempunyai arti jika ia hidup bersama-sama dengan yang lainnya di masyarakat, perlu bekerja sama dan saling membantu. Tetapi sebagai makhluk berperasaan, mempunyai emosi, manusia juga memerlukan tanggapan emosional dari orang lain. Misalnya pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional lainnya yang sangat penting artinya bagi pergaulan dan kesejahteraan hidup yang sehat.

### 3. Pandangan terhadap Hubungan Manusia dengan Masyarakat

Pandangan pertama memberi arti sangat kuat kepada manusia sebagai pribadi, yang menempatkan kebebasan individu dalam bobot



berlebihan dalam hubungannya dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk mencapai kemajuan, manusia sering bergulat dalam persaingan bebas, penindasan terhadap yang lemah, hanya menuntut hak tetapi sering mengabaikan kewajiban. Pola demikian tidak kita setuju secara fundamental karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan asas keadilan esosial seluruh rakyat Indonesia

Pandangan kedua memberi arti sangat berlebihan pada masyarakat, sehingga kedudukan manusia dalam pandangan ini tidak lebih dari alat mesin raksasa masyarakat. Walaupun mungkin sistem itu dapat memberikan kecukupan materiil, namun kepuasan tidak terpenuhi, timbul tekanan batin.

Jadi bagaimana yang ideal ? Kita tidak mengawinkan atau memilih salah satu dari pandangan di atas, tetapi harus ada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan anatara manusia dengan masyarakatnya yang tidak netral, dalam arti harus pula dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila misalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Brubacher, John S., *Modern Philosophies of Education*, Tokyo, Kugakusha Company Ltd., 1962
2. Dewey, John, *Philosophy of Education*, New Jersey, Little field, Adams & Co., 1961
3. *Britannica Encyclopaedia*, Chicago, William Benton Publisher, 1956
4. G.F.W. Hegel., *Philosophy of Right*, London, 1958
5. D.J.O. Connor, *Aquinas and Natural Law*, London, 1967
6. M. Noor Syam, dkk., *Pancasila ditinjau dari segi Filsafat*, Surabaya, Usaha Nasional, 1982.

UNIVERSITAS TERBUKA